

**PROSES PENYELESAIAN PERKARA PERBUATAN MELAWAN
HUKUM TERHADAP KESALAHAN KREDITUR (BANK)
DALAM PERJANJIAN KREDIT
(Studi Kasus Di Pengadilan Negeri Surakarta)**



**Disusun sebagai salah satu syarat menyelesaikan Program Studi Strata I pada
Jurusan Ilmu Hukum Fakultas Hukum**

Oleh:

NITA ARI ANDRIYANI

C100140006

**PROGRAM STUDI ILMU HUKUM
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SURAKARTA
2020**

HALAMAN PERSETUJUAN

**PROSES PENYELESAIAN PERKARA PERBUATAN MELAWAN HUKUM
TERHADAP KESALAHAN KREDITUR (BANK) DALAM PERJANJIAN KREDIT
(Studi Kasus Putusan Pengadilan Negeri Surakarta)**

PUBLIKASI ILMIAH

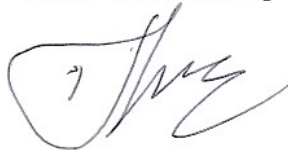
oleh:

NITA ARI ANDRIYANI

C100140006

Telah diperiksa dan disetujui untuk diuji oleh:

Dosen Pembimbing



(Nuswardani, S.H., S.U.)

HALAMANA PENGESAHAN

**PROSES PENYELESAIAN PERKARA PERBUATAN MELAWAN
HUKUM TERHADAP KESALAHAN KREDITUR (BANK) DALAM
PERJANJIAN KREDIT**

(Studi Kasus Di Pengadilan Negeri Surakarta)

OLEH

NITA ARI ANDRIYANI

C100140006

**Telah dipertahankan di depan Dewan Penguji
Fakultas Hukum
Universitas Muhammadiyah Surakarta
Pada hari jumat , 7 Februari 2020
dan dinyatakan telah memenuhi syarat**

Dewan Penguji:

- 1. Nuswardhani, S.H., S.U.
(Ketua Dewan Penguji)**
- 2. Darsono, S.H., M.H.
(Anggota I Dewan Penguji)**
- 3. Inayah, S.H., M.H.
(Anggota II Dewan Penguji)**

()
()
()

Dekan,



(Prof. Dr. H. Khudzaifah Dimiyati, SH., M.Hum)

PERNYATAAN

Dengan ini saya menyatakan bahwa dalam publikasi ilmiah ini tidak terdapat karya yang pernah diajukan untuk memperoleh gelar kesarjanaan di suatu perguruan tinggi dan sepanjang pengetahuan saya juga tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan orang lain, kecuali secara tertulis diacu dalam naskah dan disebutkan dalam daftar pustaka.

Apabila kelak terbukti ada ketidakbenaran dalam pernyataan saya di atas, maka akan saya pertanggungjawabkan sepenuhnya.

Surakarta, 1 Februari 2020

Penulis



NITA ARI ANDRIYANI

C100140006

PROSES PENYELESAIAN PERKARA PERBUATAN MELAWAN HUKUM TERHADAP KESALAHAN KREDITUR (BANK) DALAM PERJANJIAN KREDIT (Studi Kasus Di Pengadilan Negeri Surakarta)

Abstrak

Bank merupakan lembaga keuangan yang memiliki fungsi sebagai perantara keuangan untuk menyalurkan dana dari pihak yang memiliki dana secara berlebihan (surplus) Kepada pihak yang mengalami kekurangan dana (lack of found). Fungsi Bank yang demikian diwujudkan dalam bentuk kegiatan perkreditan dan berbagai jasa yang diberikan, bank memberikan pelayanan terhadap kebutuhan pembiayaan serta melancarkan mekanisme sistem pembayaran bagi semua sektor. Dalam Perkara Perbuatan Melawan Hukum Terhadap Kesalahan Kreditur (Bank) Dalam Perjanjian Kredit maka penelitian ini bertujuan untuk mengetahui implementasi pemberian kredit yang dilakukan oleh Bank BRI, untuk mengetahui hakim dalam menentukan pembuktian atas perkara perbuatan melawan hukum yang dilakukan Bank BRI, untuk mengetahui hakim dalam menentukan putusan terhadap perkara yang telah terbukti mengenai perbuatan melawan hukum yang dilakukan Bank BRI. Penelitian ini menggunakan Metode pendekatan normatif karna penelitian ini yang akan diteliti adalah kaidah-kaidah hukum, asas-asas hukum tentang proses penyelesaian perkara perbuatan melawan hukum terhadap kesalahan kreditur dalam perjanjian kredit dan Jenis penelitian yang digunakan adalah *deskriptif* yaitu untuk menggambarkan secara jelas mengenai proses penyelesaian perkara perbuatan melawan hukum terhadap kesalahan kreditur dalam perjanjian kredit. Hasil penelitian diperoleh yaitu bahwa Pemberian kredit oleh Bank BRI terlebih dahulu memenuhi syarat-syarat dan ketentuan yaitu: a) Syarat Administrasi, seperti identitas diri, mengisi formulir pengajuan kredit dan melengkapi surat agunan; b) setelah syarat administrasi terpenuhi maka AO melakukan prakarsa kredit atas debitur/calon debitur; c) pimpinan cabang menimbang apakah calon debitur tersebut layak mendapatkan pinjaman dengan patokan RPC (*Repayment Capacity*). Debitur pada perjanjian kredit yang dilakukan dengan Bank BRI tidak membayar (wanprestasi), dikarenakan selama perjanjian kredit berjalan ternyata Tergugat tidak menjelaskan kepada Penggugat mengenai kategori kredit yang diatur di dalam Peraturan Bank Indonesia Nomor: 7/2/PBI/2005 tentang Penilaian Kualitas Aktiva Bank Umum dan Surat Edaran Dirjen Pajak No. SE09/PJ.42/1999. Sampai gugatan diajukan di Pengadilan Negeri Surakarta. Sebab Tergugat menyatakan Polis Asuransi tersebut sudah diterangkan dalam Pasal 13 Akta Notariil Perjanjian Kredit Pemilikan Rumah Bank Rakyat Indonesia (KPR-BRI) Nomor 60 tanggal 30 Desember 2016. Hakim dalam menentukan putusan perkara perbuatan melawan hukum melihat Penggugat dalam gugatan *a quo* tidak dapat membuktikan dalil-dalil dalam petitum. Putusan hakim terhadap perkara perbuatan melawan hukum pada perjanjian kredit adalah; Menolak gugatan Penggugat seluruhnya dan Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara yang hingga saat ini berjumlah 1.366.000.00 (satu juta tiga ratus enam puluh enam ribu rupiah).

Kata kunci: perjanjian kredit, perbuatan melawan hukum, penyelesaian perkara di pengadilan negeri.

Abstract

Banks are financial institutions that have the function as financial intermediaries to channel funds from parties who have excess funds (*surplus*) To those who experience a lack of funds (*lack of found*). The function of the Bank as manifested in the form of credit activities and various services provided, The bank provides services to financing needs and expedites payment system mechanisms for all sectors. In the Case of Legal Unlawful Against Creditor (Bank) Errors In the Credit Agreement, this study aims to determine the implementation of credit provision by Bank BRI, to find out the judge in determining evidence of cases of illegal acts committed by Bank BRI, to find out the judge in determining verdicts on proven cases concerning unlawful acts carried out by BRI Bank. This research uses the normative approach method because this research will be examined are legal principles, legal principles regarding the process of resolving cases of illegal actions against the crisis of sleep in credit agreements and This type of research is descriptive, which is to illustrate clearly the process of resolving cases of illegal actions against creditors' mistakes in credit agreements. The results of the study were obtained, namely that the provision of credit by BRI firstly fulfilled the terms and conditions, namely: a) Administrative Requirements, such as identification, filling out credit application forms and completing collateral letters; b) after the administrative requirements have been met, AO initiates a credit initiative for the debtor / prospective debtor; c) the branch leader considers whether the prospective debtor is eligible for a loan with the benchmark RPC (Repayment Capacity). The debtor in the credit agreement made with Bank BRI does not pay (default), because during the credit agreement it turns out that the Defendant did not explain to the Plaintiff about the credit categories stipulated in Bank Indonesia Regulation Number: 7/2 / PBI / 2005 concerning Assessment of Bank Asset Quality General and Director General of Tax Circular No. SE09 / PJ.42 / 1999. Until the lawsuit was filed in the Surakarta District Court. Because the Defendant stated that the Insurance Policy had been explained in Article 13 of the Notarial Deed of the People's Ownership Credit Agreement for Bank Rakyat Indonesia (KPR-BRI) Number 60 dated December 30, 2016. The judge in determining the case decision against the law saw the Plaintiff in a quo lawsuit could not prove the argument -Lalil in petitum. Judges' verdict on cases of acts against the law in a credit agreement are; Refused the Plaintiff's claim in full and Punished the Plaintiff to pay the court fee, which to date amounted to 1,366,000.00 (one million three hundred sixty-six thousand rupiah).

Keywords: credit agreement, acts against the law, settlement of district court cases.

1. PENDAHULUAN

Bank merupakan lembaga keuangan yang memiliki fungsi sebagai perantara keuangan untuk menyalurkan dana dari pihak yang memiliki dana secara berlebihan (*surplus*) kepada pihak yang mengalami kekurangan dana (*lack of found*) (Ismail, 2010). Fungsi bank yang demikian diwujudkan dalam bentuk kegiatan prekreditasi dan berbagai jasa yang diberikan, bank memberikan pelayanan terhadap kebutuhan

pembiayaan serta meluncurkan mekanisme sistem pembayaran bagi semua sektor perekonomian.

Definisi dari bank dijelaskan pada Pasal 1 angka 2 Undang-undang Nomor 10 Tahun 1998 Tentang Perbankan bahwa bank adalah;

“sebuah usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya kepada masyarakat dalam bentuk kredit dan atau bentuk-bentuk lain dengan tujuan untuk meningkatkan taraf hidup banyak orang”.

Definisi bank berdasarkan standar akuntansi keuangan (PSAK) Nomor 31 yaitu; bank adalah suatu lembaga yang berperan sebagai perantara keuangan antara pihak-pihak yang memiliki kelebihan dana dan pihak-pihak yang memerlukan dana serta sebagai lembaga yang berfungsi memperlancar lalu lintas pembayaran.

Unsur esensial daripada kredit bank yaitu adanya kepercayaan dari bank sebagai kreditur terhadap nasabah peminjam sebagai debitur. Kepercayaan yang timbul berdasarkan terpenuhinya semua ketentuan dan syarat untuk mendapatkan kredit bank oleh debitur (Badrulzaman, 1989).

Pemberian kredit yang dilakukan oleh bank memiliki unsur resiko, sehingga hal tersebut perlu langkah antisipasi oleh bank dalam bentuk sistem pengaman. Sistem pengaman atas suatu resiko pemberian kredit bertujuan untuk meminimalisir resiko yang akan timbul atas perjanjian kredit berupa kredit macet dikemudian hari. Prinsip yang diterapkan oleh bank dalam menghadapi resiko dikemudian hari adalah dengan melakukan analisa 5C yang meliputi watak (*character*), kemampuan (*capacity*), kondisi (*condition*), modal (*capital*), jaminan (*collateral*) (Kasmir, 2002).

Lampiran Surat Edaran Bank Indonesia Nomor 14/26/DKBU Tanggal 19 Desember 2012 Perihal Standar Kebijakan Perkreditan mengenai prosedur pemberian kredit, diantaranya; a) pengajuan berkas; b) melengkapi dokumen berupa foto copy berupa; 1) identitas diri; 2) akte notaris; 3) tanda daftar perusahaan; 4) NPWP; 5) foto copy sertifikat jaminan; 6) penyelidikan berkas pinjaman; 7) *on the spot*; 8) wawancara; 9) keputusan kredit; 10) penandatanganan akad kredit; 11) realisasi kredit; 12) penyaluran dana.

Perjanjian kredit yang telah ditandatangani oleh para pihak baik yang dalam bentuk akta dibawah tangan atau dalam bentuk akta otentik (dibuat dihadapan

notaris) memiliki fungsi; a) sebagai alat bukti bagi kreditur dan debitur; b) sebagai alat atau sarana pemantauan atau pengawasan kredit yang sudah diberikan; c) menjadi dasar dari perjanjian ikutannya berupa pengikatan jaminan; d) sebagai bukti atas hutang daripada debitur (Sutarno, 2009).

Problematika yang timbul daripada perjanjian kredit tidak hanya bersumber daripada nasabah saja, akan tetapi juga bisa bersumber daripada pihak perbankan sebagai kreditur. Masalah yang timbul daripada perjanjian kredit yang bersumber dari pihak bank diantaranya adalah; a) bank tidak melakukan analisa secara detail mengenai pemberian kredit kepada nasabah; b) tidak diberikannya dokumen terkait perjanjian kredit kepada nasabah.

Seperti dalam perkara perjanjian kredit antara bank dengan nasabah, dimana bank telah lalai dalam perjanjian kredit dengan tidak memberikan dokumen salinan kepada debitur, sehingga bank dianggap telah melakukan perbuatan hukum. Penggugat dalam perkara ini melakukan perjanjian kredit dengan pihak Bank BRI Tbk, Sudirman-Solo. Pada tanggal 1 Desember 2016 debitur mendapat surat penawaran putusan kredit nomor B-KC/VII/ADK/12/2016 dengan fasilitas kredit Rp 3.000.000.000 (tiga milyar rupiah) dengan obyek jaminan berupa tanah dan bangunan kepemilikan SHM No. 02.991 atas nama Ny. Octavia yang terletak di Juanda Ruko 3, Kelurahan Jagalan, Kecamatan, Jebres, Kota Surakarta. Dalam perjanjian tersebut Penggugat tidak diberikan salinan perjanjian kredit dan polis asuransi oleh pihak Bank, bahkan sampai masalah ini dilakukan melalui proses hukum pada tingkat Pengadilan Negeri Surakarta. Salinan perjanjian tersebut merupakan hak daripada Penggugat. Pada perjanjian kredit dimana bank dengan tidak memberikan salinan perjanjian kepada debitur sehingga debitur melakukan penuntutan kepada bank BRI.

Perbuatan Bank BRI dengan tidak memberikan salinan perjanjian kepada debitur merupakan perbuatan melawan hukum sebagaimana dijelaskan pada Pasal 1365 dijelaskan bahwa: "Tiap perbuatan yang melanggar hukum dan membawa kerugian kepada orang lain, mewajibkan orang yang menimbulkan kerugian itu karena kesalahannya untuk menggantikan kerugian tersebut.

Perbuatan Melawan Hukum tidak selalu memiliki arti sekedar perbuatan yang bertentangan atau melanggar undang-undang, akan tetapi suatu perbuatan yang harus dihindari dalam hubungan sosial baik terhadap pribadi atau benda. Dampak dari Perbuatan Melawan Hukum tersebut Perbuatan PT. Bank BRI merugikan daripada nasabah, karena dengan tidak memberikan salinan perjanjian polis asuransi daripada perjanjian kredit, nasabah tidak mengetahui perhitungan nominal daripada asuransi yang berlaku dalam perjanjian tersebut (Projodikoro, 1994).

Berdasarkan penjelasan pada latar belakang masalah, penulis akan melakukan penelitian mengenai perjanjian kredit dan sistem yang diterapkan oleh bank dalam perjanjian kredit kepada debitur serta kendala yang dialami dalam perjanjian kredit, dalam hal ini penulis memilih judul: **“Proses Penyelesaian Perkara Perbuatan Melawan Hukum Terhadap Kesalahan Kreditur (Bank) Dalam Perjanjian Kredit (Studi Kasus Di Pengadilan Negeri Surakarta)”**.

Berdasarkan penjelasan pada latar belakang, maka penulis akan merumuskan masalah yang akan diteliti, diantaranya adalah: a) Bagaimana implementasi pemberian kredit yang dilakukan oleh Bank BRI Solo?; b) Bagaimana hakim dalam menentukan pembuktian atas perkara perbuatan melawan hukum yang dilakukan Bank BRI?; c) Bagaimana hakim dalam menentukan putusan terhadap perkara yang telah terbukti mengenai perbuatan melawan hukum yang dilakukan bank BRI?

Penelitian mengenai perjanjian kredit memiliki tujuan yang hendak diperoleh, diantaranya adalah: a) Untuk mengetahui implementasi pemberian kredit yang dilakukan oleh Bank BRI; b) Untuk mengetahui hakim dalam menentukan pembuktian atas perkara perbuatan melawan hukum yang dilakukan Bank BRI; c) Untuk mengetahui hakim dalam menentukan putusan terhadap perkara yang telah terbukti mengenai perbuatan melawan hukum yang dilakukan bank BRI.

2. METODE

Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode normatif, karena dalam penelitian ini yang akan diteliti adalah kaidah-kaidah hukum, asas-asas hukum tentang Proses Penyelesaian Perkara Perbuatan Melawan Hukum Terhadap

Kesalahan Kreditur (Bank) Dalam Perjanjian Kredit (Studi Kasus Di Pengadilan Negeri Surakarta) (Muhammad, 2004).

Jenis penelitian yang digunakan adalah *deskriptif* yaitu untuk menggambarkan secara jelas mengenai Proses Penyelesaian Perkara Perbuatan Melawan Hukum Terhadap Kesalahan Kreditur (Bank) Dalam Perjanjian Kredit (Studi Kasus Di Pengadilan Negeri Surakarta). Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer dan data sekunder. Data diperoleh melalui studi pustaka, studi lapangan, dan wawancara.

Metode Analisis data yang digunakan yaitu normatif-kualitatif dengan menyusun data-data yang dikumpulkan meliputi peraturan, buku-buku, yurisprudensi mengenai Proses Penyelesaian Perkara Perbuatan Melawan Hukum Terhadap Kesalahan Kreditur (Bank) Dalam Perjanjian Kredit (Studi Kasus Di Pengadilan Negeri Surakarta). yang dipadukan pendapat responden dilapangan. Setelah itu dicari permasalahannya, dianalisa secara kualitatif kemudian ditarik kesimpulan.

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

3.1 Implementasi Pemberian Kredit yang Dilakukan oleh Bank BRI

Berdasarkan hasil penelitian pada Bank BRI bahwa pelaksanaan perjanjian kredit yang dibuat oleh PT. Bank BRI dengan nasabah debitur adalah suatu perjanjian baku (*standart contract*) dimana klausul-klausul perjanjian tersebut sudah dibakukan dan dituangkan dalam bentuk blangko/formulir. Dengan demikian berarti hal-hal yang berhubungan dengan syarat dan ketentuan mengenai perjanjian kredit telah ditentukan oleh pihak bank. Apabila calon nasabah debitur menerima dan menyetujui isi dari perjanjian kredit tersebut, maka ia hanya akan diminta untuk menandatangani saja tanpa diperbolehkan untuk mengubah isi atau klausul dari perjanjian kredit tersebut.

Syarat Administrasi; 1) Nasabah calon debitur mengunjungi Bank Rakyat Indonesia untuk membuat ataupun mengisi surat keterangan permohonan kredit dengan membawa persyaratan yang sebelumnya telah di ketahui, yakni legalitas perorangan dan badan usaha/hukum, surat perizinan usaha. Usaha yang baru memulai, minimal usahanya telah berjalan 6 (enam) bulan, perpanjangan jangka

waktu, perubahan jumlah, perubahan struktur, tipe dan syarat kredit, restrukturisasi maupun penyelesaian kredit harus diajukan secara tertulis dengan mengajukan surat permohonan oleh debitur dan dicatat oleh ADK dalam register permohonan kredit (register SKPP); 2) AO melakukan prakarsa kredit atas debitur/calon debitur dalam mempertimbangkan efisiensi dan efektifitas dalam melakukan pemeriksaan, pembinaan, dan monitoring terhadap debitur/usahanya; 3) pimpinan cabang menimbang apakah calon debitur tersebut layak mendapatkan pinjaman dengan patokan RPC (*Repayment Capacity*). Apabila RPC terpenuhi, diputuskan persetujuan kredit beserta plafon kredit yang akan diberikan. Tahap terakhir yakni realisasi di Teller. Pada saat realisasi, dokumen atau syarat-syarat sudah harus dilengkapi oleh calon debitur.

Syarat Hukum; 1) Perjanjian kredit yang dilakukan oleh Bank BRI dengan nasabah dijalankan sesuai dengan UU Perbankan No. 10 Tahun 1998 pasal 1 ayat 11, “Kredit adalah penyediaan uang atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu, berdasarkan persetujuan atau kesepakatan pinjam meminjam antara bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak peminjam untuk melunasi utangnya setelah jangka waktu tertentu dengan pemberian bunga”; 2) Bank sebagai kreditur menjalankan perjanjian kredit berdasarkan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan dalam Pasal 6; 3) Debitur Tidak Membayar Alasan debitur tidak melakukan pembayaran dalam perjanjian kredit adalah bahwa selama perjanjian kredit berjalan ternyata Tergugat tidak menjelaskan kepada Penggugat mengenai kategori kredit Penggugat sebagaimana diatur di dalam Peraturan Bank Indonesia Nomor: 7/2/PBI/2005 tentang Penilaian Kualitas Aktiva Bank Umum lihat Pasal 12 Ayat 3, dan Surat Edaran Dirjen Pajak No. SE09/PJ.42/1999. Sampai gugatan diajukan di Pengadilan Negeri Surakarta. Penggugat tidak pernah diberi salinan salinan perjanjian kredit, salinan polis asuransi yang merupakan hak Penggugat dan hak lain seperti hak atas informasi yang benar, jelas dan jujur. Tergugat juga telah melakukan pelanggaran *clausula baku* yang ditetapkan oleh Tergugat secara sepihak dan oleh karenanya batal demi hukum *Vide* (Pasal 18 ayat 3 UU No. 8 tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen). Karena tidak diberikannya salinan perjanjian kredit ataupun salinan polis asuransi yang dibuat dihadapan NOTARIS yaitu salinan

polis asuransi tersebut, maka merupakan suatu perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Tergugat.

3.2 Hakim dalam Menentukan Pembuktian Atas Perkara Perbuatan Melawan Hukum yang Dilakukan Bank BRI

Dalil gugatan Peggugat pada pokoknya adalah Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum karena pada tanggal 1 Desember 2016 Peggugat mendapatkan Putusan Kredit Nomor B – KC/VII/ADK/12/2016 dengan fasilitas kredit sebesar Rp. 3.000.000.000,00 (tiga milyar rupiah) dengan obyek jaminan berupa tanah dan bangunan SHM Nomor 02991 atas nama Ny. Octavia, terletak di Juanda Ruko 3 Kelurahan Jagalan Kecamatan Jebres Surakarta .Peggugat oleh Tergugat tidak pernah diberikan salinan salinan perjanjian kredit, salinan polis asuransi, informasi yang jelas dan jujur dan Tergugat juga telah melakukan pelanggaran klausula baku yang ditetapkan Tergugat, sehingga Peggugat tidak dapat mengetahui secara tehnik pelaksanaan kredit, sehingga surat perjanjian kredit yang ditandatangani oleh Peggugat dan Tergugat adalah cacat hukum.

Eksespi Tergugat terhadap gugatan Peggugat adalah Perjanjian Kredit antara Debitur (Nyonya Octavia dan Peggugat) dengan Tergugat telah dibuat dalam bentuk Akta Notaris oleh Agus Subyanto, Sarjana Hukum selaku Notaris di Surakarta. Dengan semikian maka kedudukan hukum antara Debitur dengan Kreditur adalah sama yaitu sebagai Para Pihak yang menghadap Notaris. Dengan demikian, apabila Peggugat menginginkan perjanjian kredit tersebut maka Peggugat dapat saja mengajukan permintaan kepada Notaris akan tetapi Peggugat tidak melakukan hal tersebut dan hanya menunggu pemberian daripada Tergugat selaku Kreditur. Untuk membuktikan gugatannya Peggugat hanya mengajukan surat bukti berupa surat penawaran putusan kredit tanggal 1 Desember 2016 sedangkan untuk membuktikan dalil sangkalannya Tergugat telah mengajukan surat bukti sebanyak 7 (tujuh) lembar. Dari bukti bertanda T.1 (Fotokopi Akta Notariil Perjanjian Kredit Pemilikan Rumah Bank Rakyat Indonesia (KPR-BRI) Nomor 60 tanggal 30 Desember) dan T.2 (Fotokopi Akta Notariil Restrukturisasi Kredit Pemilikan Rumah Nomor 10 tanggal 6 November 2017).

Dan telah pula diakui oleh Penggugat telah terjadi hutang antara Penggugat dengan Tergugat. Bahwa terhadap kredit tersebut sebagaimana surat bukti bertanda T3, T4 Penggugat memberikan jaminan Sertifikat Hak Milik Nomor 02991 Kelurahan Jagalan atas nama My Oktavia dan terhadap jaminan tersebut telah diterbitkan Sertifikat Hak Tanggungan yang dibuat dihadapan Notaris PPATAgus Subyanto, SH. Bahwa sebagaimana bukti bertanda T5, T6, T7 telah dikirim surat peringatan I, II dan III kepada Penggugat.

Eksepsi Tergugat terhadap gugatan yang diajukan Penggugat terkait dengan Polis Asuransi, hal tersebut sudah diterangkan dalam Pasal 13 Akta Notariil Perjanjian Kredit Pemilikan Rumah Bank Rakyat Indonesia (KPR-BRI) Nomor 60 tanggal 30 Desember 2016 yang pada intinya kedua Pasal tersebut mengatur sebagai berikut: a) Debitur wajib mempertanggungkan atau mengasuransikan atas beban sendiri dengan Banker's Clause untuk dan atas nama BANK kepada Perusahaan asuransi yang ditunjuk oleh BANK, seluruh maupun sebagian barang-barang yang dipergunakan sebagai jaminan kredit ini baik yang telah ada maupun yang akan ada dikemudian hari minimal selama jangka waktu kredit dengan kemungkinan sewaktu-waktu dapat diperpanjang oleh Pengambil kredit sebagaimana disebutkan dalam polis dan disimpan oleh BANK; b) Penghadap Nyonya Octavia, Sarjana Ekonomi diwajibkan mengikuti asuransi jiwa atas namanya sendiri dengan pertanggungan sebesar Rp. 3.000.000.000 (tiga milyar rupiah), jangka waktu 84 (delapan puluh empat) bulan pada perusahaan asuransi rekanan Bank Rakyat Indonesia dengan Banker's Clause untuk dan atas nama Bank Rakyat Indonesia dan premi dibayar oleh Debitur dengan pembayaran sekaligus pada saat realisasi kredit. Pinjaman akan lunas apabila peminjam pertama meninggal dunia; c) Polis asuransi kebakaran dan asuransi jiwa disimpan di BANK.

Bukti-bukti yang diajukan oleh Penggugat dan Tergugat Majelis Hakim berkesimpulan, tidak ada satupun bukti yang menunjukkan Tergugat tidak memberikan salinan akta perjanjian kredit, sehingga Penggugat tidak mengetahui akan hak dan kewajibannya, bukti Penggugat bertanda P.1 walaupun hanya berupa fotocopi, bukti ini berhubungan dengan bukti bertanda P.1 dan P.2, dimana

Penggugat telah membubuhkan tanda tangan yang berarti Penggugat mengetahui apa yang menjadi hak dan kewajibannya ;

Berdasarkan keterangan dari Penggugat dan Tergugat, maka hakim dalam menentukan pembuktian atas perkara perbuatan melawan hukum yang dilakukan Bank BRI adalah bahwa Penggugat dalam gugatannya tidak mampu membuktikan kesalahan yang dilakukan Tergugat berupa perbuatan melawan hukum dengan tidak memberikan polis asuransi. Sebab Tergugat menyatakan Polis Asuransi tersebut sudah diterangkan dalam Pasal 13 Akta Notariil Perjanjian Kredit Pemilikan Rumah Bank Rakyat Indonesia (KPR-BRI) Nomor 60 tanggal 30 Desember 2016 yang pada intinya kedua Pasal tersebut mengatur bahwa Polis asuransi Debitur wajib mempertanggungungkan atau mengasuransikan atas beban sendiri dengan Banker's Clause untuk dan atas nama BANK kepada Perusahaan asuransi yang ditunjuk oleh BANK, seluruh maupun sebagian barang-barang yang dipergunakan sebagai jaminan kredit baik yang telah ada maupun yang akan ada dikemudian hari minimal selama jangka waktu kredit dengan kemungkinan sewaktu-waktu dapat diperpanjang oleh Pengambil kredit sebagaimana disebutkan dalam polis dan disimpan oleh BANK; b) diwajibkan mengikuti asuransi jiwa atas namanya sendiri dengan pertanggungan sebesar Rp. 3.000.000.000 (tiga milyar rupiah), jangka waktu 84 (delapan puluh empat) bulan pada perusahaan asuransi rekanan Bank Rakyat Indonesia dengan Banker's Clause untuk dan atas nama Bank Rakyat Indonesia dan premi dibayar oleh Debitur dengan pembayaran sekaligus pada saat realisasi kredit. Pinjaman akan lunas apabila peminjam pertama meninggal dunia; c) Polis asuransi kebakaran dan asuransi jiwa disimpan di BANK dengan ini hakim dalam pembuktiannya menyatakan bahwa Tergugat tidak melakukan perbuatan melawan hukum sebagaimana Petitum Penggugat dikarenakan pemberian polis asuransi harus dilakukan oleh Penggugat sendiri sebagai Debitur.

3.3 Hakim dalam Menentukan Putusan terhadap Perkara yang Telah Terbukti Mengenai Perbuatan Melawan Hukum yang Dilakukan Bank BRI

Hakim dalam menentukan putusan perkara perbuatan melawan hukum melihat pada Pasal 1365 KUHPdata yang isinya harus memenuhi: a) Perbuatan tersebut

melawan hukum; b) Harus ada kesalahan pada pelaku; c) Harus ada kerugian; d) Harus ada hubungan kausal antara perbuatan dan kerugian.

Bahwa rumusan Perbuatan melawan hukum terdapat dalam pasal 1365 KUHP perdata yang berisi: Seseorang yang karena salahnya telah menimbulkan kerugian bagi orang lain pengertian perbuatan melawan hukum (*onrechtmatige daad*) dalam hukum perdata diartikan secara luas mengandung makna bahwa bukan hanya melanggar peraturan Undang-undang yang tertulis akan tetapi meliputi juga perbuatan kepatutan dan kebiasaan di masyarakat pada umumnya termasuk dalam perkara ini Penggugat dan Tergugat telah melakukan ikatan perjanjian kredit sudah barang tentu dua pihak harus mengetahui apa yang telah para pihak buat baik fakta maupun yuridisnya perjanjian kredit tersebut termasuk perjanjian yang mengikutinya dalam perikatan tersebut.

Penggugat dalam gugatan *a quo* tidak dapat membuktikan dalil-dalil dalam petitum mengenai kerugian materiil dan immateriil dimana Tergugat tidak pernah memberikan salinan salinan perjanjian kredit, salinan polis asuransi, informasi yang jelas dan jujur dan Tergugat juga telah melakukan pelanggaran klausula baku yang ditetapkan Tergugat, sehingga Penggugat tidak dapat mengetahui secara tehnik pelaksanaan kredit, sehingga surat perjanjian kredit yang ditandatangani oleh Penggugat dan Tergugat adalah cacat hukum. Karena tidak terpenuhinya unsur-unsur perbuatan melawan hukum pada Pasal 1365 KUHP perdata. Hakim juga menyatakan bahwa suatu gugatan baik dalam positanya maupun dalam petitumnya pihak Penggugat tidak menjelaskan dengan lengkap dan sempurna tentang ganti rugi yang dituntutnya dan Penggugat tidak dapat membuktikan mengenai jumlah/besarnya kerugian yang dituntut dan harus dibayarkan kepadanya oleh Tergugat, maka gugatan menuntut ganti rugi ini tidak dapat dikabulkan atau ditolak oleh hakim.

Ketentuan apabila Penggugat selaku debitor wanprestasi, maka Tergugat selaku Kreditor pemegang hak tanggungan mempunyai hak untuk menjual obyek hak tanggungan sendiri melalui pelelangan umum serta mengambil pelunasan akan piutangnya itu, sehingga tidak ada satupun bukti yang menunjukkan Tergugat tidak memberikan salinan akta perjanjian kredit, sehingga Penggugat tidak mengetahui akan hak dan kewajibannya, bukti Penggugat bertanda P.1 walaupun hanya berupa

fotocopi, bukti ini berhubungan dengan bukti bertanda P.1 dan P.2, dimana Penggugat telah membubuhkan tanda tangan yang berarti Penggugat mengetahui apa yang menjadi hak dan kewajibannya.

Putusan hakim terhadap perkara perbuatan melawan hukum pad perjanjian kredit adalah; a) Menolak gugatan Penggugat seluruhnya; b) Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara yang hingga saat ini berjumlah 1.366.000.00 (satu juta tiga ratus enam puluh enam ribu rupiah).

4. PENUTUP

4.1 Kesimpulan

Pertama, Pemberian kredit oleh Bank BRI terlebih dahulu memenuhi syarat-syarat dan ketentuan yaitu: a) Syarat Administrasi, seperti identitas diri, mengisi formulir pengajuan kredit dan melengkapi surat agunan; b) AO melakukan prakarsa kredit atas debitur/calon debitur dalam mempertimbangkan efisiensi dan efektifitas berupa pemeriksaan, pembinaan, dan monitoring terhadap debitur/usahanya; c) pimpinan cabang menimbang apakah calon debitur tersebut layak mendapatkan pinjaman dengan patokan RPC (*Repayment Capacity*). Perjanjian kredit yang dilakukan oleh Bank BRI dengan nasabah dijalankan sesuai dengan UU Perbankan No. 10 Tahun 1998 pasal 1 ayat 11 dan Bank sebagai kreditur menjalankan perjanjian kredit berdasarkan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan dalam Pasal 6. Debitur pada perjanjian kredit yang dilakukan dengan Bank BRI tidak membayar (wanprestasi), dikarenakan selama perjanjian kredit berjalan ternyata Tergugat tidak menjelaskan kepada Penggugat mengenai kategori kredit yang diatur di dalam Peraturan Bank Indonesia Nomor: 7/2/PBI/2005 tentang Penilaian Kualitas Aktiva Bank Umum lihat Pasal 12 Ayat 3, dan Surat Edaran Dirjen Pajak No. SE09/PJ.42/1999. Sampai gugatan diajukan di Pengadilan Negeri Surakarta. Penggugat tidak pernah diberi salinan salinan perjanjian kredit, salinan polis asuransi yang merupakan hak Penggugat dan hak lain seperti hak atas informasi yang benar, jelas dan jujur.

Kedua, Penggugat dalam gugatannya tidak mampu membuktikan kesalahan yang dilakukan Tergugat berupa perbuatan melawan hukum dengan tidak

memberikan polis asuransi. Sebab Tergugat menyatakan Polis Asuransi tersebut sudah diterangkan dalam Pasal 13 Akta Notariil Perjanjian Kredit Pemilikan Rumah Bank Rakyat Indonesia (KPR-BRI) Nomor 60 tanggal 30 Desember 2016. Diwajibkan mengikuti asuransi jiwa atas namanya sendiri dengan pertanggungan dan jangka waktu 84 (delapan puluh empat) bulan pada perusahaan asuransi rekanan Bank Rakyat Indonesia dengan Banker's Clause untuk dan atas nama Bank Rakyat Indonesia dan premi dibayar oleh Debitur dengan pembayaran sekaligus pada saat realisasi kredit; c) Polis asuransi kebakaran dan asuransi jiwa disimpan di BANK dengan ini hakim dalam pembuktiannya menyatakan bahwa Tergugat tidak melakukan perbuatan melawan hukum sebagaimana Petitum Penggugat dikarenakan pemberian polis asuransi harus dilakukan oleh Penggugat sendiri sebagai Debitur.

Ketiga, Hakim dalam menentukan putusan perkara perbuatan melawan hukum melihat pada Pasal 1365 KUHPerdara Penggugat dalam gugatan *a quo* tidak dapat membuktikan dalil-dalil dalam petitum mengenai kerugian materiil dan immateriil dimana Tergugat tidak pernah memberikan salinan salinan perjanjian kredit, salinan polis asuransi, informasi yang jelas dan jujur dan Tergugat juga telah melakukan pelanggaran klausula baku yang ditetapkan Tergugat, sehingga Penggugat tidak dapat mengetahui secara teknis pelaksanaan kredit, sehingga surat perjanjian kredit yang ditandatangani oleh Penggugat dan Tergugat adalah cacat hukum. Putusan hakim terhadap perkara perbuatan melawan hukum pada perjanjian kredit adalah; Menolak gugatan Penggugat seluruhnya dan Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara yang hingga saat ini berjumlah 1.366.000.00 (satu juta tiga ratus enam puluh enam ribu rupiah).

4.2 Saran

Untuk Hakim, diharapkan kedepannya dapat lebih teliti memeriksa sengketa perjanjian antara bank dengan debitur sehingga memberikan putusan yang adil diantara kedua belah pihak.

Untuk Bank, diharapkan kedepannya membuat sistem perjanjian kredit yang lebih sistematis sehingga sengketa atau persoalan hukum yang ditimbulkan dapat dicegah.

Untuk debitur, diharapkan kedepannya dalam melakukan perjanjian melakukan pengecekan terhadap isi perjanjian sehingga tidak terjadi kekeliruan dan berakibat pada persoalan hukum.

DAFTAR PUSTAKA

- Badrulzaman, Mariam Darus. (1989). *Beberapa Masalah Hukum Dalalm Perjanjian Kredit Bank Dengan Jaminan Hypotek Serta Hambatan-hamabatannya Dalam Praktek Di Medan*. Bandung: Alumni.
- Ismail. (2010). *Perbankan Islam vs Konvensional*, Jakarta: VIV Press.
- Kasmir. (2002). *Bank dan Lembaga Keuangan Lainnya*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.
- Muhammad, Abdulkadir. (2004). *Hukum dan Penelitian Hukum*. Bandung: PT. Citra Aditya Bakti.
- Projodikoro, R. Wirjono. (1994). *Perbuatan Melanggar Hukum*. Bandung: Sumur Bandung.
- Sutarno. (2009). *Aspek-aspek Hukum Perkreditan pada Bank*. Bandung: Alfabeta.